



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2024**

**Disusun Oleh :**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Kabupaten Banjarnegara**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 mencakup analisa hasil renja dan hasil evaluasi Renja tahun lalu. Perumusannya terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Bakesbangpol dan Rencana Kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 - 2026 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, Januari 2024



KEPALA BAKESBANGPOL  
KABUPATEN BANJARNEGARA

**IZAK DANIAL ALOY, S.STP, M Si**

Pembina Tingkat I (IV/b)

19800830 199810 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
10. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara,  
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 2).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

**BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

**BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

**BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

**BAB 5 : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 6 program, 11 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 18.846.769.760 -, dengan fokus utama pada Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan dasar yaitu dengan meningkatkan pendidikan budi pekerti dan wawasan kebangsaan sejak dini. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Keterbatasan personil yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlu penguatan dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan.
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kondusivitas wilayah dan ketentraman dan keamanan lingkungan.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang wawasan kebangsaan.
5. Masih rendahnya penahaman masyarakat di bidang politik terutama bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal.
6. Masih maraknya pergaulan bebas dan minuman keras di masyarakat yang bisa membahayakan bagi remaja/pelajar dan sulitnya mengidentifikasi komunitas penyalahgunaan narkoba.

Dari 6 program, 11 kegiatan, dan 21. sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 6 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp, 18.846.769.760 -

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 6 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.518.575.948,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/sub kegiatan tidak ada penambahan tapi adanya refocusing dan pergeseran anggaran terutama yang ada di belanja honor tim kegiatan, honor pengelola keuangan, uang tranpot peserta, standar belanja makan dan minum, adapun yang bertambah meliputi belanja gaji ASN adanya tunjangan dan kenaikan pangkat, belanja jasa listik, belanja pemeliharaan kendaraan dinas,

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **tidak memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program /kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 4 orang, terealisasi 3 orang (PTT 2 orang dan THL 1 orang), sehingga ada 1 kekosongan THL dan anggaran masih dimunculkan.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan (Bela Negara) dengan target peserta 300 orang terealisasi 150 orang, yang rencana akan

dilaksanakan 3x , dimana kegiatan 2 kali dilaksanakan pada perubahan anggaran, sehingga ada 1 kegiatan yang tidak diselenggarakan karena waktu yang tersedia tidak cukup.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (FKUB)

Dengan target 40 kelompok, kegiatan selama 4 kali, namun terealisasi 30 kelompok melalui 3 kali pertemuan forum, sehubungan dengan waktu yang tersedia tidak cukup sampai batas akhir tahun tidak bisa dilaksanakan sehingga kegiatan belum memenuhi target.

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Hibah Ormas) dengan target 4 Ormas, terealisasi 2 ormas. Karena ada 2 (dua) lembaga yang belum berbadan hukum. Sehingga ada pengembalian dan realisasi belum memenuhi target yang diharapkan.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Disepakatinya rumusan pola (Formula) baru, kegiatan Forkompinda pada menjelang akhir triwulan ke tiga 2021 pasca diterbitkannya Perpres 33 tahun 2020 khususnya terkait larangan pemberian honorarium kegiatan. Adanya perpres no 33 tahun 2020 tidak diperkenankan memberikan honor kepada forkompinda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi **ketidaktercapaian** tersebut antara lain adalah

1. Anggaran yang sudah direncanakan mengalami penyesuaian/Refocusing beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dan pergeseran untuk menunjang operasional perangkat daerah ahirnya dalam APBD Perubahan diajukan pengurangan dan pergeseran anggaran.
2. Terkendala dengan aturan Perpres 33 Tahun 2020 terkait dengan pemberlakuan larangan pemberian Honorarium bagi tim kegiatan.
3. Adanya Lembaga Ormas yang belum berbadan Hukum.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah **memenuhi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan poerangkat daerah telah memenuhi target 10 dok.
- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan targer 16 orang, realisasi target 16 org.
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD dari target 7 orang terealisasi 7 orang.
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari target 16 paket, teralisasi 16 paket.
- 5) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 3 paket terealisasi 3 pkt.
- 6) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan target 3 paket trealisasi 3 pkt.
- 7) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dan atau kendaraan dinas jabatan dengan target 8 unit, terealisasi.8 unit.
- 8) Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 24 unit.
- 9) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (Penyuluhan kepada masyarakat) dengan target 4 pokmas, terealisasi 4 pokmas.
- 10) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah ( Hibah Parpol) dengan target 10 Parpol, terealisasi 10 Parpol.
- 11) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik di Daerah (forum diskusi politik) dengan target 100 orang peserta terealisasi 100 orang

- 12) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (fasilitasi Ormas) dengan target 20 ormas/LSM, terealisasi 20 ormas/LSM.
  - 13) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target 2 konflik, terealisasi 3 konflik tertangani.
  - 14) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah FKDM) dengan target 2 kali kegiatan, terealisasi 2 kegiatan.
- c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang **melebihi target** kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Verifikasi dan monev banparpol) dari target 9 parpol terealisasi 10 parpol.  
Target 9 parpol dalam Renstra merupakan hasil pemilu Tahun 2019 . Dari hasil Pemilu 2019 terdapat 10 parpol yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Banjarnegra dan telah mendapatkan banparpol.
  2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Kominda)

dengan target 600 Laporan Informasi Harian /LIH. Dan ada peningkatan jumlah laporan yang masuk dan ditindaklanjuti dengan terealisasi sampai ahir tahun 805 LIH.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

- 1) Kerjasama yang harmonis dan koordinasi yang baik antara Tim pengelola kegiatan dan Pengguna Anggaran.
- 2) Terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah/Instansi terkait dalam ikut serta menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, sehingga situasi kondusif di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat terjaga.
- 3) Terbangunnya komunikasi yang baik antara pemeluk agama dengan masyarakat dan pemerintah serta dengan dibentuknya Forum Kurukunan Umat Beragana, /FKUB dalam upaya menghindari konflik agama, sehingga bisa mendukung kondusivitas wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- 4) upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang keamanan lingkungan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat.
- 5) Anggaran banparpol dipertanggungjawabkan sesuai dengan rincian anggaran dan belanja berdasar permohonan /proposal yang diajukan oleh penerima banparpol.
- 6) Monitoring/pemantauan dan koordinasi dengan pihak -pihak terkait dalam upaya menjaga keamanan dan ketentraman.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara dengan pihak-poihak terkait untuk mengkaji peran masyarakat terutama generasi pemuda dengan terus memberikan pemahaman dan wawasan tentang Idiologi Pancasila, UUD 1945 dan moralitas perlu pembekalan tentang idiologi Pancasila agar mempunyai jiwa Nasionalisme dan tetap tegaknya NKRI. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik bagi masyarakat, pejabat, tokoh masyarakat serta tokoh agama.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
3. Pendampingan kepada pengelola banpol dalam penyusunan RAB dan pertanggungjawaban banpol melalui rapat forum dan konsultasi maupun monev.
4. Meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan perkembangan situasi wilayah, dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:



1	Daerah Kab/kota	Perkantoran	B	B (63,10)	B (60,08)	B 63,33)	105,40	B (60,08)	63.33	105,40
		<b>Nilai SAKIP</b>								
8.01 .2.01	<i>Kegiatan. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Prosentase penyampaian laporan dan ikhtisar capaian SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01 .2.0 1.01	Sub Kegiatan. Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan laporan capaian kinerja yg disusun	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100%	10 dok	10 dok	100%
8.01 .2.0 2	<i>Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah</i>	<b>Prosentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah</b>	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01 .2.0 2.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang	16 org/ 14 bl	16 org	16 org	16 org	100%	16 org	16 or	100%



		<b>aparatur</b>								
8.01 .2.0 8.02	Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	3 laporan	3 pkt	3 pkt	3 pkt	100%	3 pkt	3 pkt	100%
8.01 .2.0 8.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Honor PTT THL yang terbayar	5 orang	3 orang	5 orang	3 orang	60 %	3 org	3 org	100%
8.01 .2.0 9	<i>Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana yang tersedia</b>	100%	-	-	-	-	-		
8.01 .08. 09.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 paket (Laptop, Korden, Meja kusi tamu)	4 unit	-	-	-	-	3 unit	100%

8.01 .2.1 0	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.</i>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara</b>	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%
8.01 .2.0 9.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.....	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
8.01 .2.0 9.02	Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	24 unit	24 unit	24 unit	24 unit	100%	24 unit	24 unit	
8.01 .02	<b>Program Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Kelompok yang mendapat pembinaan Bela negara</b>	100%							

8.01 .02. 2.01	<i>Keg Perumusan kebijakan tehnik dan peemantapan pelaksanaan bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>									
8.01 .02. 2.01 .04	Sub Keg: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang idiologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan ( <b>Pembinaan Bela Negara</b>	jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan bela Negara	200 org	300 or	300 or	150 org	50%	300 or	2300 org	100%
8.01 .02. 2.01 .05.	Sub Keg. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan dibidang idiologi wawasan kebangsaan ,Bela negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Ijin Penelitian yang diterbitkan	lap	0	100%	100%	100%	100%	-	-



	<i>pemanatauan situasi politik.</i>									
8.01 .03. 01.0 2	Sub Keg.Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendidkan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pemilu Kepala Daerah serta pemanatauan situasi politik di daerah.  <b>(Penyuluhan kepada masyarakat)</b>	Jumlah Pokmas yang mengikuti Pendidikan Politik	orang	-	4 pokmas	4 pokmas	100%	4 pokmas	-	-
8.01 .03. 01.0 3.	Sub Keg.Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah serta	Jumlah Partai Politik yang mendapat Hibah bantuan keuangan	10 dok	-	10 parpol	10 parpol	100%	10 parpol	10 parpol	100%

	pemantaun situasi politik didaerah ( <b>Bantuan Hibah uanga kepada Partai politik</b> )									
8.01 .03. 01.0 4	Sub Keg. Plaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokt\yasi, fasilitasi kelembagaan pemerinatahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah peserta pemantauan situasi politik didaerah ( <b>Koordinasi forum forum diskusi politik</b> )	Jumlah masyarakat yang mengikuti diskusi politik	200 org	-	100 or	100 or	100%	100 or	100 org	100%
8.01 .03. 01.0 5	Sub Keg. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Jumlah partai politik yang difasilitasi mendapat bantuan	10 lap	-	9 parpol	10 parpol	111 %	10 parpol	10 parpol	100%

	pemerintahan, perswakilan dan partai politik, pemilu/pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah <i>(Verifikasi dan pemeriksaan persyaratan Banpol)</i>									
8.01 .04	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Ormas/LSM yang diberikan SKT</b>	100%	76% (19 orms/25x100)	100%	88 (22ormas/25x100)	88%	100%	100%	100%
8.01 .04. 2.01	<i>Keg perumusan tehns dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>									
8.01 .04. 2.01 .03	Sub Keg.Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi	Jumlah Ormas/LSM yang mendapat bantuan	1 dok	-	14 ormas/LSM	13 ormas/LSM	92,8%	14 ormas	12 ormas	100%

	sengketa ormas , pengawasan dan ormas asing didaerah <b>(Hibah kepada ormas,LSM</b>	hibah uang.								
8.01 .04. 2.01 .05	Sub Keg.Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan dan ormas asing didaerah ( <b>Fasilitasi Ormas, LSM,parpol dan OKP</b> Bantuan Hibah kepada Ormas/LSM	Jumlah Ormas yang difasilitas	100 org	-	20 ormas	20 ormas	100%	25 ormas	25 ormas	100%
8.01 .05	<b>Program pembinaan dan pengembangan Ketahanan ekonomi sosial dan budaya</b>	<b>Persentase sekolah yang mendapatka n pembinaan P4GN</b>	25%-	-	15%	17,9% (24/134X1 00)	119%	15%	15%	100%



		<b>Berkurangnya jumlah konflik agama</b>	<b>Jumlah konflik agama yang timbul</b> <b>1 konflik</b>	0	1 konflik	0	0	1 konflik		
8.01 .05. 2	<i>Keg: Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>									
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (P4GN)	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan P4GN	25%	-	24 sklh	24	100%	24 sklh	29 sekolah	100%
8.01 .05. 2.01	Sub Keg. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan	Jumlah Pokmas yang mendapat pembinaan	2 lap (gab 2 sub keg POA &	-	40 klpk (200 or)	30 klmpk (150 or)	75%	40 klpk	40 kelmpk	100%

.05	ekonomi, Sosial , Budaya, dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ( <b>Peningatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama/FKUB</b>	kerukunan beragama	FKUB)							
<b>8.01 .06</b>	<b>Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial</b>	<b>Berkurangnya jumlah konflik masyarakat</b>	%	3 konflik	2 konflik	2 konflik	100%	1 konflik	0 konflik	100%
8.01 .06.	Keg Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan lewaspadaan nasional dan penanganan konflik soaisl									
8.01 .06. 2.01	Sub Keg. Penyusunan	Jumlah potensi dan konflik yang	80 org	11	3 konflik	3 konflik	100%	5 konflik	0 konflik	100%

.02	bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelegen, pemanatauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah (penangan konflik)	tertangani (data 17 konflik		konflik						
8.01 .06. 2.01 .03	Sub Keg.Pelaksanaan Kebijakan dil Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	Jumlah Laporan Informasi Harian (LIH) yang termonitor wasdinda	12 dok	-	600 LIH	805 LIH	134%	600 LIH	600 LIH	100%

	(Pemberdayaan Kominda/wasdinda)									
8.01 .06. 2.01 .04	Sub Keg.Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemanatauan orang asing, Tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewadpadaan, serta penanganan konflik diderah (FKDM)	Jumlah fasilitasi FKDM	2 dok	-	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mengampu 5 Indikator. Dari 4 indikator tersebut, berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Dan 1 indikator Urusan Administrasi Pemerintahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah :

1. Belum tercapainya indikator Persentase peningkatan jumlah ormas/LSM yang diberikan SKT dari target 25 ormas dan yang mengajukan keberadaan ormas di Bakesbangpol th 2022, ada 22 ormas sehingga target belum terpenuhi.
2. Indikator Berkurangnya jumlah konflik masyarakat Dari target 1 konflik masyarakat Th 2022 tidak ada konflik yang ditangani atau relaisasi 0 konflik, sehingga capaiannya 100%  
(Rumus pengitungan capaian: apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik)
3. Indikator Berkurangnya jumlah konflik agama Dari Target 1 konflik agama Th 2022 tidak ada konflik agama yang tertangani atau 0 konflik, sehingga capaiannya 100%  
(Rumus capaian sama dengan Rumus Konflik Masyarakat)
4. Indikator Persentase sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dari target 100% dengan bertambahnya jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan sehingga realisasi capaian 117% .
5. Indikator Prosentase Pemilih dalam Pemilu Tahun 2022 tidak Pemilu, sehingga kegiatan tidak bisa terealisasi
6. Kegiatan Rapat koordinasi anggota Forkopimda dan terlaksana sesuai target.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Mempertahankan usulan dalam program/Kegiatan/Sub kegiatan yang merupakan prioritas program khususnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Banjarnegara
2. Akan lebih selektif dan teliti dalam membuat perencanaan program anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Perlu penguatan Dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Persentase peningkatan jumlah ormas/LSM yang diberikan SKT	-		-	100%	100%		100%	-	76%	88%	100%		Belum mencapai dari target 25 ormas karena, yang mengajukan keberadaan ormas di Bakesbangpol th 2021, 22 ormas / melebihi di tahun 2022
	Persentase Cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan keberadaan ormas				-	-		25%	50%	-	-	-	100%	
2	Berkurangnya	-		-	2	1		1	1	3	0 konflik	100%	-	Dari target 2 konflik

	jumlah konflik masyarakat										-100%			<p>masyarakat dari Th 2021 tidak ada konflik yang ditangani, sehingga capaiannya 100%</p> <p>Rumus pengitungan capaian: apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik</p> <p>Capaian= (2 x target) dikurangi_realisasi / taget_x100%</p>
	Persentase penanganan konflik		-	-	-		25%	25%	-	-	-		100%	
3	Berkurangnya jumlah konflik agama	-	-	1	1		1	1	0	0	konflik =100%	100%		<p>Dari target 1 konflik agama, Th 2021 tidak ada konflik yang ditangani, sehingga capaiannya 100%</p> <p>(Rumusan capaian</p>

														sama dengan konflik Masyarakat)
	Persentase Ormas (yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/I diologi Pancasila				-	-		25 %	25%	-	-	-	100%	
4	Persentase sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	-		-	15%	15%		-	-	0	15, % (24/134x100)	17,9%	100%	Sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari target 15% dengan capaian 17,9% adanya penambahan jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan.
	Persentase orang yang				-	-		25 %	25%	-	-	25%	100%	

	mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)													
5	Prosentase Pemilih dalam Pemilu				-	Pilbup 70-75%		Pilprs, pileg, pilbup pilgub.	0	0	0	-	Tahun 2021 tidak Pemilu, sehingga kegiatan tidak bisa terealisasi	
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik				-	-	25%	25%	-	-	-	100%		
6	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah				1 th (1 keg)	1 th (1 keg)	-	-	-	1 th (1 keg)	100%	-	Kegiatan Rapat koordinasi anggota Forkopimda terlaksana sesuai	



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam satu. urusan, yaitu Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup satu urusan tersebut.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Keterbatasan personil yang belum memadai dan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlu penguatan dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan.
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kondusivitas wilayah dan ketentraman dan keamanan lingkungan.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang wawasan kebangsaan.
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat di bidang politik terutama bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal.
6. Masih maraknya pergaulan bebas dan minuman keras di masyarakat yang bisa membahayakan bagi remaja/pelajar dan sulitnya mengidentifikasi komunitas penyalahgunaan narkoba.

7. Perlu penguatan Dukungan Kebijakan dan anggaran khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target dan rfealisasi progran dan kegiatan.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Situasi wilayah tidak kondusif.
2. Munculnya konflik di masyarakat.
3. Kecenderungan terjadinya degradasi nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.
4. Potensi berkembangnya paham-paham idiologi diluar pancasila (paham radikal).
5. Pendirian tempat ibadah yang terindikasi aliran garis keras yang menjadi pemicu konflik agama dimasyarakat .

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinu.

Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

**Peluang Eksternal**

- a. Adanya nilai nilai luhur dari personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  1. Terbitnya Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terahir

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memperkuat keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24 lebih memperkuat keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Perangkat Daerah sebagaimana Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **Peluang Internal**

- a. adanya nilai-nilai luhur dari personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  1. Kerjasama, artinya komitmen diantara personil yang diperlukan untuk mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi, misi dan juga menghindari ego sektoral dan mementingkan bidangnya sendiri dengan mengorbankan tujuan bersama, dengan kata lain diperlakukan kerjasama yang harmonis antara bidang dengan sekretariat untuk mewujudkan visi misi.
  2. Disiplin, artinya bahwa setiap personil Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara harus memegang komitmen untuk

mempunyai sikap dan perilaku mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.

3. Tangung jawab, artinya didalam melaksanakan pekerjaan dilakukan dengan sebaik baiknya dan selalu dibarengi dengan rasa penuh tanggungjawab dengan kata lain sikap bersedia dan untuk menanggung akibat atas perilaku dan perbuatan yang dilakukan.
  4. Pengabdian, artinya sebagai unit pelayanan maka dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata mata didasarkan penghargaan imbalan materi, namun harus diutamakan pengabdian, rela berkorban tenaga, waktu dan biaya sekalipun.
- b. Adanya 12 (dua belas) Etika Budaya malu yang digalakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahayanya pemakaian/pengguna maupun pengedar narkoba dan sejenisnya.

3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pekerja sektor informal.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan dan ideologi kebangsaan.
5. Masih adanya kejadian kesalah pahaman di masyarakat, sehingga dapat menimbulkan suatu konflik.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi :

1. Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan dasar melalui Memantapkan pendidikan budi pekerti dan wawasan kebangsaan sejak dini.
2. Penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pemahanan pertahanan keamanan di Kabupaten Banjarnegara bisa berjalan aman , lancar tanpa diikuti konflik yang menonjol.

Hal tersebut yang menjadikan roh yang menjadi satu isu strategi terkait Tupoksi Bakesbangpol.

Tabel 2  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Presentase Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100 %</b>		<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Presentase Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>100 %</b>		
<b>a.</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan</b>		<b>Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional</b>	<b>25 %</b>		<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan</b>		<b>Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional</b>	<b>25 %</b>		

	<b>Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>dan penanganana konflik sosial</b>			<b>Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>		<b>dan penanganana konflik sosial</b>			
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaaan Bidang	2 dok	Rp. 40.000.000,-	Sub Kegiatan Penyusuna n Program Kerja di Bidang Kewaspada an Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, dan Kewaspada an Peratasan Antar Negara,		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang	2 dok	Rp. 40.000.000,-	

	Daerah (FKDM)		Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah			Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah (FKDM)		Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah		
2.	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi</i>	12 dok	Rp. 150.000.000,-	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi</i>	12 dok	Rp. 150.000.000,-

	Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Kominda)		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah			an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Kominda)		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah		
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan		Persentase Penanganan Konflik Sosial	100 %	Rp. 30.000.000,-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan		Persentase Penanganan Konflik Sosial	100 %	Rp. 30.000.000,-

	Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Konflik)					an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah (Konflik)				
4.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 dok	Rp. 259.150.000,-	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 dok	Rp. 259.150.000,-	
<b>II</b>	<b>Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		<b>Persentase Ormas yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan</b>	<b>25 %</b>		<b>Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Ormas yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan</b>	<b>25 %</b>		

			kebangsaan /Idiologi Pancasila				kebangsaan /Idiologi Pancasila			
<i>a.</i>	<i>Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan</i>		<i>Persentase terlaksananya pementapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan</i>	<i>25 %</i>		<i>Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan</i>	<i>Persentase terlaksananya pementapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan</i>	<i>25 %</i>		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan	40 org	Rp. 210.000.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan	40 org	Rp.817.357.500,-	

	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Bela Negara)		Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Bela Negara)		Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
III	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama</b>		<b>Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>25 %</b>		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama</b>		<b>Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>25 %</b>	
a.	<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan</i>		<i>Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi,</i>	<i>25 %</i>		<i>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan</i>		<i>Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi,</i>	<i>25 %</i>	

	<i>Ekonomi, Sosial Budaya</i>		<i>sosial dan budaya</i>			<i>an Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya</i>		<i>sosial dan budaya</i>			
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (P4GN)		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 org	Rp. 50.000.000,-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (P4GN)		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 org	Rp. 25.000.000,-	
2.	Sub Kegiatan		Jumlah	2 lap	Rp.	Sub		Jumlah	2 lap	Rp.	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (FKUB)		laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		75.000.000,-	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (FKUB)		laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100.000.000,-	
<b>IV.</b>	<b>Peningkatan Peran Partai</b>		<b>Persentase Penggunaa</b>	<b>77 %</b>		<b>Peningkatan Peran</b>		<b>Persentase Penggunaa</b>	<b>77 %</b>		

	<b>Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>		<b>n hak pilih pada Pemilu/Pe milukada</b>			<b>Partai Politik dan Lembaga Pendidika n Melalui Pendidika n Politik dan Pengemba ngan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>n hak pilih pada Pemilu/Pe milukada</b>			
<b>a.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan</b>		<b>Persentase Penggunaa n hak pilih pada Pemilu/Pem ilukada</b>	<b>77%</b>		<b>Perumusa n Kebijakan Tehnis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Pendidika n politik, Etika Budaya Politik Peningkat</b>	<b>Persentase Penggunaa n hak pilih pada Pemilu/Pem ilukada</b>	<b>77%</b>		

	<b>dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik</b>					<b>an Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik</b>				
1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	10 dok	Rp. 39.336.000.000,-	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	10 dok	Rp. 27.341.167.200,-		

	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik	200 org	Rp. 100.000.000,-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik	200 org	Rp. 385.000.000,-

	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah laporan hasil monitoring,	10 lap	Rp. 15.000.000,-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring,	10 lap	Rp. 15.000.000,-		

	<p>Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>		<p>evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik</p>		<p>dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pe milu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>		<p>evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik</p>				
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

V.	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>Persentase cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Keberadaan Ormas</b>	<b>50 %</b>		<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>Persentase cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Keberadaan Ormas</b>	<b>50 %</b>		
<i>α.</i>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas</b>	<b>50 %</b>		<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>		<b>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas</b>	<b>50 %</b>		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	4 Lap	Rp. 15.975.000.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,	4 Lap	Rp. 16.590.700.200,-	

	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Hibah Ormas)		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Hibah Ormas)		Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	100 org	Rp. 20.000.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi		Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	100 org	Rp. 35.000.000,-	

	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Fasilitasi Ormas)		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Fasilitasi Ormas)		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
<b>VI.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>		
<b>a.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>		

1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	10 dok	Rp. 12.500.000,-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	10 dok	Rp. 1.000.000,-	
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	Rp. -	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	Rp. 9.000.000,-	
<b>b.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100 %</b>		<b>Kegiatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>		

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>terlayani a administra si keuangan perangkat daerah</b>			<b>Administra si Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>terlayani a administra si keuangan perangkat daerah</b>	<b>%</b>		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 org/bln	Rp. 2.230.350.078,-	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 org/bln	Rp. 1.785.814.890,-	
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	Rp. 126.060.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	Rp. 38.872.500,-	
<b>c.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terlayani a administra si umum</b>	<b>100 %</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlayani a administra si umum</b>	<b>100 %</b>		

			<i>perangkat daerah keu- angan perangkat daerah</i>					<i>perangkat daerah keu- angan perangkat daerah</i>			
1.	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 paket	Rp. 10.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 paket	Rp. 11.000.000,-	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 paket	Rp. 200.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 paket	Rp. 206.136.000,-	
d.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota</b>		<b>Persentase tersedianya administrasi umum pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>		<b>Persentase tersedianya administrasi umum pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>		

					<b>Kab/Kota</b>					
1.	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	Rp. 62.000.000,-	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	Rp. 48.500.000,-
<b>e</b>	<b>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	Rp. 26.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	Rp. 26.000.000,-
2.	Sub Kegiatan		Jumlah	13 bln	Rp.	Sub		Jumlah	13 bln	Rp.

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		100.614.608,-	Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		100.614.000,-
<i>f.</i>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	10 unit	Rp. 25.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	10 unit	Rp. 17.670.000,-



Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Masih kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional untuk mendukung percepatan kinerja yang optimal.
2. Ketersediaan sumberdaya anggaran belum optimal untuk mendukung pencapaian program kegiatan yang menyangkut program prioritas.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Nihil				

#### 2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.....  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	<b>Peningkatan Peran Partai Poltik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Kab.Banjarnegara	<b>Peningkatan Peran Partai Poltik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Suara sah Parpol DPRD x besaran nilai per suara sah ( 548.932 suara x Rp.3000,- = Rp.1.646.796.750,-	Mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 yaitu berdasarkan suara sah hasil pemilu parpol yang mendapat kursi DPRD hasil Pemilu 2024 dikalikan besaran nilai Banparpol /per suara sah sesuai SK Penetapan Gubernur Jawa Tengah Nomor 211/2/2021, tanggal 27 Januari 2021
	<i>Keg: Perumusan kebijakan tehnik an pematapan pelaksanaan bidang pendidikan poluk, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilu Kepala Daerah serta pemanatauan situasi politik</i>				
	Sub Keg. Pelaksananan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi HPolitik di Dacrah <b>(Bantuan Hibah parpol</b>				
2	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Kab.Banjarnegara	Jumlah Ormas yang/LSM mendapat bantuan hibah uang	Jumlah bantuan untuk 23 Ormas di Kab. Banjarnegara sebesar:	Masukan dari usulan melalui pokok pokok pikiran anggota legiaslatif menjadi acuan dasari program/kegiata

				Rp. 16.517.00 0.000,-	n Th.2024

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025, arah kebijakan umum pembangunan nasional pada periode jangka menengah ke-4 (Tahun 2020 – 2024) adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi itu didukung oleh mantapnya

kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh. Mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan

masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah

tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan **urusan pemerintahan Bidang kesatuan bangsa dan politik** agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara :

1. **Tujuan** disusunnya Renja Bakebangpol Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah unuk memberikan arah gambaran dan pedoman mengenai program, kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada tahun 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan jangka menengah yang akan dicapai antara lain :

1. Terwujudnya Kondusivitas Daerah;
2. Terwujudnya kualitas kehidupan Politik yang demokratis;
3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. **Sasaran** yang dicapai pada Tahun 2024 :

1. Meningkatnya ketentraman dan keamanan masyarakat
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Politik
3. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Bidang Kesbangpol

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjaregara Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 sebagai berikut:

*(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)*

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

**Kabupaten Banjarnegara**

**Tahun 2024**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
8.			<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>										
8.	01.		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>48.050.447.690</b>				
8.	01.	01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>2.262.072.790</b>				
8.	01.	01.	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>10.000.000</b>			
8.	01.	01.	2.01	0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjarnegara,	Nilai SAKIP	66,52	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	10 dok	Tersusunnya Dok Perencanaan dan Pelaporan	10 dok	1.000.000
8.	01.	01.	2.01	0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjarnegara,	Nilai SAKIP	66,52	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	Terlaksananya koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	9.000.000

<b>8.</b>	<b>01.</b>	<b>01.</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1.824.687.390</b>
8.	01.	01.	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjarnegara,	Prosentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan .	14 bln	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 bln	1.785.814.890
8.	01.	01.	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	7 org	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	7 org	38.872.500
<b>8.</b>	<b>01.</b>	<b>01.</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>217.136.000</b>
8.	01.	01.	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlayannya administrasi umum perangkat daerah	100%	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 pkt	Tercukupinya sarana prasarana kebersihan kantor	3 pkt	11.000.000
8.	01.	01.	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlayannya administrasi umum perangkat daerah	100%	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	16 pkt	Tercukupinya bahan logistik kantor	16 pkt	206.136.000

8.	01.	01.	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota</b>							<b>48.500.000</b>	
8.	01.	01.	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Banjarnegara,	Persentase tersedianya administrasi umum pemerintah daerah	100%	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor	3 Unit	48.500.000
8.	01.	01.	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>126.614.000</b>	
8.	01.	01.	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjarnegara,	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	26.000.000
8.	01.	01.	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjarnegara,	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 bln	Terbayarnya honor PTT/THL	13 bln	100.614.000
8.	01.	01.	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>35.135.400</b>	
8.	01.	01.	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjarnegara,	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	17.670.000

8.	01.	01.	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjarnegara,	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	17.465.400
8.	01.	02.	2.01		<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							<b>817.357.500</b>	
8.	01.	02.	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							<b>817.357.500</b>	
8.	01.	02.	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlaksananya pementapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	25%	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Org	Terlaksananya pembinaan Bela Negara	40 Org	817.357.500

8.	01.	03.			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>							27.741.167.200	
8.	01.	03.	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>							27.741.167.200	
8.	01.	03.	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik	77%	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Terlaksananya penyaluran dana bantuan keuangan Parpol		27.341.167.200
8.	01.	03.	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Banjarnegara	Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik	77%	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik	200 org	Terlaksananya koordinasi tentang partai politik	200 org	385.000.000
8.	01.	03.	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Kab. Banjarnegara	Persentase terlaksananya pemantapan kegiatan Bidang Pendidikan Politik	77%	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik	10 Lap	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan Bantuan Keuangan Parpol	10 Lap	15.000.000

8.	01.	04.			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>							<b>16.625.700.200</b>	
8.	01.	04.	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pemanntapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>							<b>16.625.700.200</b>	
8.	01.	04.	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Kab. Banjarnegara	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas	50%	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Terlaksananya penyaluran dana bantuan hibah ormas	4 Laporan	16.590.700.200
8.	01.	04.	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Kab. Banjarnegara	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas	50%	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	Terlaksananya koordinasi di bidang Ormas	100 Orang	35.000.000

8.	01.	05.			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							125.000.000	
8.	01.	05.	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							125.000.000	
8.	01.	05.	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya	25%	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 org	Meningkatnya pemahaman tentang Bahaya Narkoba	150 org	25.000.000

8.	01.	05.	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan di bidang ekonomi, sosial dan budaya	25%	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Lap	Meningkatnya Pemahaman tentang Kerukunan Umat Beragama	2 Lap	100.000.000
----	-----	-----	------	------	---	--------------------	---	-----	--	-------	--	-------	-------------

8.	01.	06.			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>							<b>479.150.000</b>	
8.	01.	06.	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>							<b>479.150.000</b>	
8.	01.	06.	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Peratasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	Terfasilitasinya kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	2 Dokumen	40.000.000
8.	01.	06.	2.01	0001	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	Terdatanya ketidak amanan dan disintegrasi sosial di Daerah	100%	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	150.000.000

8.	01.	06.	2.01	0001	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	80 org	Terpantaunya Potensi dan Konflik Sosial di Daerah	80 org	30.000.000
8.	01.	06.	2.01	0001	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara,	Persentase terlaksananya kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 dok	Terlaksananya Rapat Koordinasi Forkopimda	12 dok	259.150.000
					<b>Tambahan Program DPRD</b>								
												<b>TOTAL</b>	<b>48.050.447.690</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana program dan kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangannya Kabupaten Banjarnegara. yang akan dilaksanakan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.**

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 5 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi umum Perangkat daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan 11 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;

4. Pelaksanaan penatausahaan danpengujian/verifikasi keuangan SKPD;
5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
6. Penyediaan bahan logistik kantor;
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
8. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
9. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyelenggaraan Pengelolaan keuangan; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Pengadaan laptop, meja kursi tamu Ruang Kepala, Korden; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**

Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*. Dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

**3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik terdiri dari 1 Kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*. Dengan sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;

- b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

#### **4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*. Dengan 2 sub kegiatan yaitu

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

#### **5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan*

*Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan 2 sub kegiatan yaitu :*

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

**6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada *Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*. Dengan 4 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah.
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi *platform* operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan : di Banjarnegara  
Pada tanggal : 2024

KEPALA BAKESBANGPOL  
KABUPATEN BANJARNEGARA



**IZAK DANIAL ALOYS, S. STP, M Si**

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19800830 199810 1 002